



Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA INDO-PASIFIK

**PROYEKSI KERJA SAMA INDONESIA – PASIFIK 2022:
PERSPEKTIF PARLEMEN**

Gianyar. Bali. 11 – 13 Januari 2022

**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Dasar Pelaksanaan Tugas
- Susunan Delegasi
- Visi dan Misi Delegasi
- Persiapan Pelaksanaan Tugas
- Anggaran

ISI LAPORAN

- Agenda Kunjungan
- Uraian Tentang Jalannya Kunjungan

KESIMPULAN

- Ucapan Terima Kasih
- Keterangan Lampiran
- Kata Penutup



L A P O R A N

**KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA INDO-PASIFIK
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Gianyar, Bali, 11-13 Januari 2022

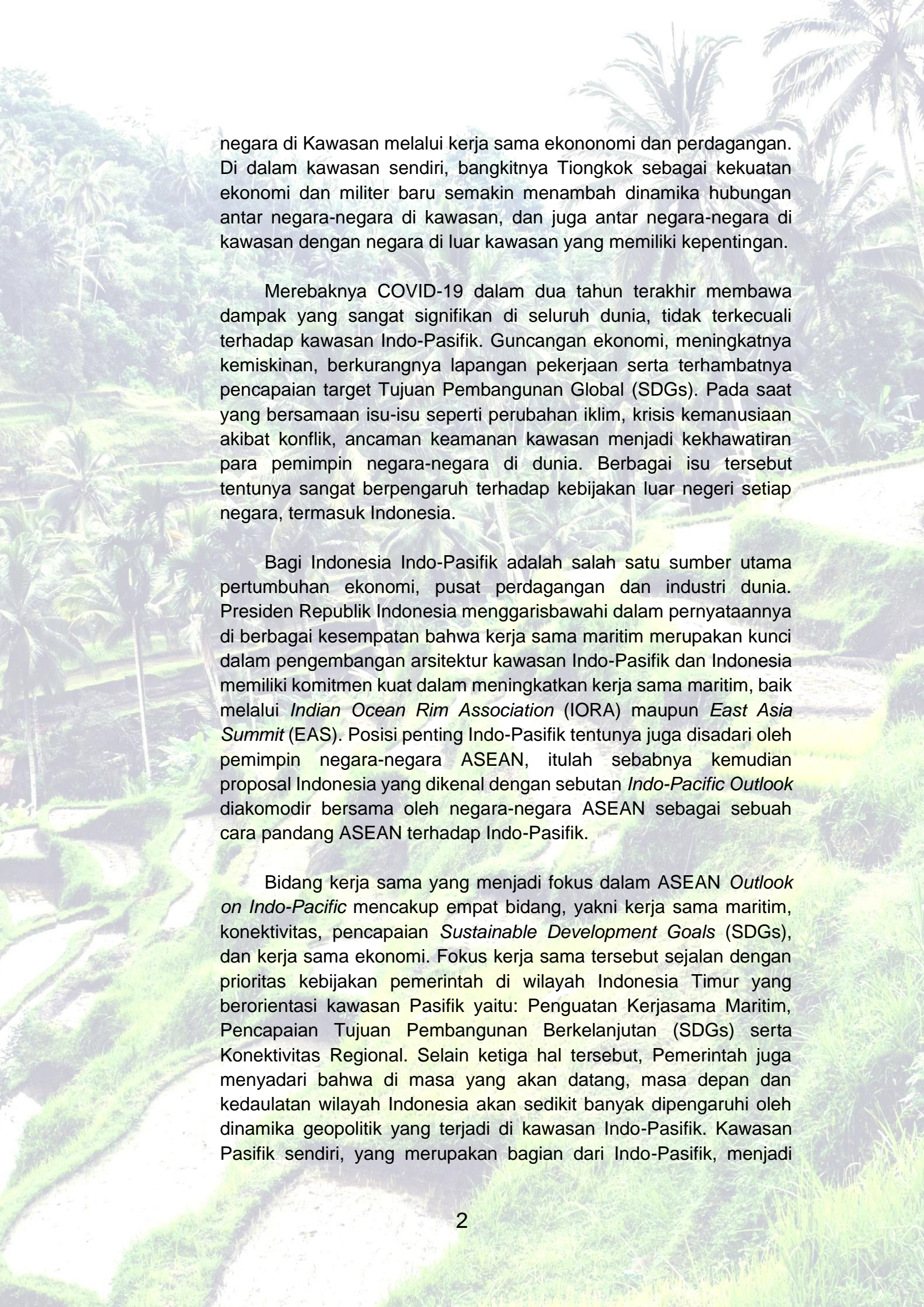
I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indo-Pasifik merupakan konsep wilayah yang lahir karena adanya dinamika kawasan Asia-Pasifik yang pada dasarnya mengacu pada penyatuan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Pendapat lain mengatakan bahwa terminologi Indo-Pasifik pada awalnya dimaksudkan sebagai alternatif dari terminologi Asia-Pasifik dan mengandung makna geologis tersendiri. Indo-Pasifik merujuk pada bentang wilayah yang mencakup Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik, Benua Asia Daratan, Benua Australia, Asia Tenggara, serta negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Amerika Serikat dan Kanada. Indonesia berada di tengah-tengah perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi tersebut menjadi penting karena menjadi lalu lintas perdagangan yang menghubungkan India dengan kawasan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik seperti Jepang, Australia hingga Selandia Baru.

Dengan konsep kewilayahan yang luas dan mencakup berbagai negara di dalamnya, membuatnya menjadi sebuah kawasan dengan silang kepentingan politik yang kompleks dan sangat dinamis. Di satu sisi, potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah ini sangat besar dan belum sepenuhnya dieksplorasi. Sedangkan di sisi lain, potensi konflik terbuka juga besar. Tidak hanya melibatkan negara-negara berkembang seperti halnya negara anggota ASEAN termasuk Indonesia, tetapi silang kepentingan di kawasan ini juga menarik perhatian negara-negara besar dari luar kawasan.

Sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga selesainya era Perang Dingin, Amerika Serikat menjadi kekuatan luar yang paling berpengaruh dan turut menentukan dinamika kawasan. Rusia juga sudah sejak lama menjadi pesaing tradisional Amerika Serikat, kemudian belakangan Uni Eropa mulai gencar mendekati negara-



negara di Kawasan melalui kerja sama ekonomi dan perdagangan. Di dalam kawasan sendiri, bangkitnya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan militer baru semakin menambah dinamika hubungan antar negara-negara di kawasan, dan juga antar negara-negara di kawasan dengan negara di luar kawasan yang memiliki kepentingan.

Merebaknya COVID-19 dalam dua tahun terakhir membawa dampak yang sangat signifikan di seluruh dunia, tidak terkecuali terhadap kawasan Indo-Pasifik. Guncangan ekonomi, meningkatnya kemiskinan, berkurangnya lapangan pekerjaan serta terhambatnya pencapaian target Tujuan Pembangunan Global (SDGs). Pada saat yang bersamaan isu-isu seperti perubahan iklim, krisis kemanusiaan akibat konflik, ancaman keamanan kawasan menjadi kekhawatiran para pemimpin negara-negara di dunia. Berbagai isu tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri setiap negara, termasuk Indonesia.

Bagi Indonesia Indo-Pasifik adalah salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi, pusat perdagangan dan industri dunia. Presiden Republik Indonesia menggarisbawahi dalam pernyataannya di berbagai kesempatan bahwa kerja sama maritim merupakan kunci dalam pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pasifik dan Indonesia memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kerja sama maritim, baik melalui *Indian Ocean Rim Association* (IORA) maupun *East Asia Summit* (EAS). Posisi penting Indo-Pasifik tentunya juga disadari oleh pemimpin negara-negara ASEAN, itulah sebabnya kemudian proposal Indonesia yang dikenal dengan sebutan *Indo-Pacific Outlook* diakomodir bersama oleh negara-negara ASEAN sebagai sebuah cara pandang ASEAN terhadap Indo-Pasifik.

Bidang kerja sama yang menjadi fokus dalam ASEAN *Outlook on Indo-Pacific* mencakup empat bidang, yakni kerja sama maritim, konektivitas, pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan kerja sama ekonomi. Fokus kerja sama tersebut sejalan dengan prioritas kebijakan pemerintah di wilayah Indonesia Timur yang berorientasi kawasan Pasifik yaitu: Penguatan Kerjasama Maritim, Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Konektivitas Regional. Selain ketiga hal tersebut, Pemerintah juga menyadari bahwa di masa yang akan datang, masa depan dan kedaulatan wilayah Indonesia akan sedikit banyak dipengaruhi oleh dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan Pasifik sendiri, yang merupakan bagian dari Indo-Pasifik, menjadi

salah satu fokus dari kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan diplomasi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu, kawasan Pasifik yang berdekatan dengan wilayah Indonesia bagian timur, memiliki potensi ekonomi yang juga menjanjikan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sejatinya telah berperan aktif melalui panggung diplomasi parlemen untuk menguatkan diplomasi pemerintah di kawasan Asia-Pasifik. Peran aktif tersebut dimulai melalui keterlibatan DPR RI dalam pendirian *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) pada tahun 1991 di Singapura. APPF merupakan forum parlemen gagasan Yasuhiro Nakasone (Mantan Perdana Menteri Jepang dan Anggota Parlemen Jepang) untuk membicarakan masalah-masalah bersama di kawasan Asia Pasifik, khususnya upaya-upaya meningkatkan taraf hidup, pendidikan dan ekonomi, serta masalah-masalah perdamaian dan keamanan di kawasan.

APPF ini meskipun kerjasama di bidang legislatif, namun bukan merupakan tandingan dari organisasi internasional yang sudah ada (yang bersifat eksekutif) tetapi justru merupakan komplementar dari *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *Pacific Economic Cooperation Conference* (PECC) dan *Pacific Basin Economic Council* (PBEC) serta merangkul *Association of South East Asia Countries* (ASEAN).

Di samping itu dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di Lingkar Pasifik, khususnya kawasan Pasifik Selatan, DPR RI menyelenggarakan *First Meeting of the Indonesia Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP) pada tanggal 24-25 Juli 2018 di Jakarta. IPPP menghasilkan *Chairs' Statement* yang memuat kesepakatan berupa "komitmen untuk saling terlibat di masa mendatang dan kesepakatan untuk mengeksplorasi inisiatif program kerja sama antar parlemen, termasuk melalui kerjasama teknis untuk peningkatan kapasitas dalam mendukung kinerja parlemen, workshop/seminars dan program-program lainnya yang ditujukan untuk memperkuat dialog antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik.

Sejalan dengan tujuan tersebut, BKSAP DPR RI bersama dengan *Institute for Peace and Democracy* (IPD) menyelenggarakan diskusi/dialog dengan civitas akademika dan *civil society* yang bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai apa yang bisa dilakukan guna meningkatkan kerja sama Indonesia dengan kawasan Indo-Pasifik. Misalnya dalam peningkatan kapasitas sesuai bidang keahlian IPD seperti; Penguatan Demokrasi, Asistensi PEMILU, *Mentoring Political Party*, dll. Demikian juga dengan Universitas Warmadewa yang melakukan kajian khusus tentang kawasan Pasifik.

B. DASAR PELAKSANAAN TUGAS

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Indo-Pasifik pada tanggal 11 – 13 Januari 2022 ke Ubud, Gianyar, Bali didasarkan pada:

1. Keputusan Rapat Pimpinan BKSAP tanggal 3 Januari 2022
2. Surat Tugas Nomor: 01/D/ST/PD-DN/BKSAP-KSR/01/2022 tanggal 4 Januari 2022.

C. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi DPR RI yang melaksanakan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Indo-Pasifik pada tanggal 11 – 13 Januari 2022 di Bali adalah sebagai berikut:



Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc
Ketua BKSAP/F-P Gerindra/A-86/
Ketua Delegasi



Putu Supadma Rudana, M.B.A
Wakil Ketua BKSAP/F-PD/A-563



Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
Wakil Ketua BKSAP/F-PKS/A-422



Ir. H. Achmad Hafisz Tohir
Wakil Ketua BKSAP/F-PAN/A-487



Gilang Dhielafarez, S.H., LLM
Anggota BKSAP/F-PDIP/A-179



Johan Budi S. Pribowo
Anggota BKSAP/F-PDIP/A-219



Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si
Anggota BKSAP/F-PDIP/A-239



I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., MM
Anggota BKSAP/F-PDIP/A-234



Drs. H. Darul Siska
Anggota BKSAP/F-PG/A-271



Ir. H. Kamrussamad, S.T., M.Si
Anggota BKSAP/F-PGerindra/A-79



Katherine A. Oe.
Anggota BKSAP/F-PGerindra/A-123



Fadhullah, SE
Anggota BKSAP/F-P Gerindra/A-59



Ratih Megasari Singkarru, M.Sc
Anggota BKSAP/F-PNasDem/A-402



Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si
Anggota BKSAP/F-PKB/A-57



H. Hasani Bin Zuber, S. IP
Anggota BKSAP/F-PD/A-559



Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M
Anggota BKSAP/F-PD/A-546



H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
Anggota BKSAP/F-PKS /A-418



Slamet Ariyadi, S.Psi
Anggota BKSAP/F-PAN /A-508



Rojih
Anggota BKSAP/F-PPP /A-466

D. VISI DAN MISI DELEGASI

Visi Delegasi:

1. DPR RI melalui BKSAP dapat berperan penting dalam menguatkan pelaksanaan salah satu dari lima fokus diplomasi pemerintah, yaitu diplomasi kedaulatan yang di prioritaskan untuk meningkatkan intensitas perundingan baik untuk batas maritim dan batas darat, serta untuk melindungi tumpah darah Indonesia.

2. Mewujudkan kolaborasi antara Parlemen dengan Akademisi dalam menguatkan diplomasi kedaulatan Indonesia khususnya di kawasan Indo-Pasifik.

Misi Delegasi:

1. Meningkatkan pemahaman DPR RI terutama Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) terkait prioritas kebijakan luar negeri RI tahun 2022 khususnya di kawasan Indo-Pasifik;
2. Memperkuat peran DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan prioritas kebijakan luar negeri melalui berbagai forum antar parlemen baik pada tingkat regional maupun internasional;
3. Meningkatkan sinergitas antara DPR RI dengan Pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada tingkat regional maupun global;
4. Mengeksplorasi dan mendiskusikan bentuk kerja sama apakah yang dirasa cocok dalam rangka peningkatan kapasitas dalam mendukung kinerja parlemen di negara-negara Pasifik, sebagai bentuk konkrit penguatan diplomasi kedaulatan wilayah oleh DPR RI.
5. Mengeksplorasi dan mendiskusikan program-program lainnya yang ditujukan untuk memperkuat dialog antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik.

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi kunjungan kerja dipersiapkan oleh tim pendamping Panja yang terdiri dari Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional BKSAP dan Tenaga Ahli BKSAP. Materi disusun berdasarkan masukan yang komprehensif dari departemen terkait. Untuk persiapan teknis, Sekretariat Kerja Sama Organisasi Regional BKSAP telah melakukan peninjauan dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali.

F. ANGGARAN

Biaya yang digunakan melakukan perjalanan dinas tersebut adalah Rp. 529.268.000 (lima ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA KUNJUNGAN

Agenda kunjungan kerja Panja Indo-Pasifik yaitu:

1. Dialog tentang perkembangan isu-isu terkini di kawasan Indo-Pasifik dengan civitas akademika dan *civil society* bertempat di Museum Rudana, Ubud, Gianyar
2. Acara peluncuran Buku Putih "*Agenda for Green Economy in Indonesia: Policy Initiative, Citizen Assembly and International Cooperation*" bertempat di The Royal Pita Maha, Ubud, Gianyar

B. URAIAN TENTANG JALANNYA KUNJUNGAN

1. Dialog tentang perkembangan isu-isu terkini di kawasan Indo-Pasifik dengan civitas akademika dan *civil society* bertempat di Museum Rudana, Ubud, Gianyar

Pada tanggal 11-13 Januari 2022, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Ubud, Bali dengan tema "Proyeksi Kerja Sama Indonesia – Pasifik 2002; Perspektif Parlemen". Kunjungan kerja ini dimaksudkan sebagai kegiatan pembuka Panitia Kerja (Panja) yang ada di BKSAP yaitu Panja Indo-Pasifik dan Panja SDGs untuk tahun 2022, sesuai dengan rekomendasi Panja terkait pada tahun sebelumnya yaitu 2021.

Adapun kegiatan utama dari kunjungan kerja adalah dialog dan diskusi dengan para akademisi dan *civil society* yang ada di Bali, guna menghimpun masukan-masukan dan rekomendasi dari semua pemangku kepentingan yang ada di Indonesia, dalam rangka memperkuat diplomasi parlemen yang dijalankan oleh BKSAP untuk tahun 2022, khususnya untuk Panja Indo-Pasifik dan Panja SDGs. Kegiatan tersebut berlangsung di Museum Rudana Ubud, Gianyar yang mengundang beberapa perwakilan dari akademisi dan *civil society* yaitu: I Ketut Putra Erawan, Ph.D Executive Director dari Institute for Peace and Democracy selaku perwakilan dari *civil society*, serta Wakil Rektor bidang Kerja Sama dari Universitas Warmadewa Bali sebagai perwakilan akademisi, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Dr. I Ngurah Setyawan.

Mengawali acara, dalam sambutan pembukanya Wakil Ketua BKSAP, **Putu Supadma Rudana**, menyampaikan bahwa dibentuknya Panja Kerja Sama Indo-Pasifik pada tahun 2022 ini merupakan kelanjutan dari Panja Kerja Sama Kawasan Pasifik yang dibentuk pada tahun 2020, serta Panja Indo-Pasifik yang dibentuk pada tahun 2021.



Secara garis besar, rekomendasi dari kedua Panja terdahulu tersebut menyarankan agar BKSAP sebagai focal point dari diplomasi parlemen DPR-RI dapat secara konsisten terus mendukung Diplomasi Kedaulatan yang menjadi salah satu fokus diplomasi Pemerintah Indonesia, di tengah dinamika geo-politik dan geo-ekonomi di Kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Kemudian disampaikan bahwa diplomasi parlemen yang dilaksanakan oleh BKSAP DPR-RI dalam lingkup regional Indo-Pasifik, adalah untuk menguatkan kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia di Indo-Pasifik, sebagaimana tercantum dalam ASEAN Indo-Pacific Outlook yang kemudian diterima sebagai sebuah cara pandang bersama negara-negara ASEAN, yaitu untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang stabil, damai dan sejahtera di tengah kecenderungan menguatnya persaingan antar negara-negara besar di luar Kawasan yang memiliki kepentingan terhadap Kawasan Indo-Pasifik.



Implementasi daripada kedua poin tersebut adalah keaktifan BKSAP DPR-RI pada forum-forum antar Parlemen di Kawasan. Baik itu dalam lingkup Asia Pasifik secara luas seperti Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), ataupun dalam lingkup yang lebih spesifik seperti Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), yang mana ini terkait juga dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di Lingkar Pasifik, khususnya kawasan Pasifik Selatan. DPR RI menyelenggarakan First Meeting of the Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada tanggal 24-25 Juli 2018 di Jakarta. IPPP menghasilkan Chairs' Statement yang memuat kesepakatan berupa komitmen untuk saling terlibat di masa mendatang dan kesepakatan untuk mengeksplorasi inisiatif program kerja sama antar parlemen, termasuk melalui kerjasama teknis peningkatan kapasitas untuk mendukung kinerja parlemen. Apakah melalui workshop atau seminar, maupun melalui program-program lainnya yang ditujukan untuk memperkuat dialog antara Indonesia dengan Parlemen negara-negara kepulauan Pasifik.



Putu Supadma Rudana juga menjelaskan bahwa diplomasi dalam rangka membangun dialog dengan Parlemen negara-negara kepulauan Pasifik ini penting karena ada dua tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama adalah memastikan pengakuan terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian yang kedua adalah mendukung Diplomasi ekonomi pemerintah, yang di dalam negeri salah satunya di aplikasikan melalui rencana pembangunan wilayah Indonesia Timur. Dalam kerangka inilah kemudian dirasa perlu untuk menghimpun masukan-masukan dan rekomendasi dari kalangan akademisi dan civil society.

Selanjutnya, dalam sambutannya sebagai Ketua BKSAP, **Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc** menyampaikan bahwa merebaknya COVID-19 dalam dua tahun terakhir membawa dampak yang sangat signifikan di seluruh dunia. Dampak seperti Guncangan ekonomi, meningkatnya kemiskinan, berkurangnya lapangan pekerjaan serta terhambatnya pencapaian target Tujuan Pembangunan Global (SDGs), juga dirasakan oleh negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik. Hal ini kemudian diperparah oleh mengemukanya isu-isu internasional yang akhir-akhir ini menjadi perhatian khusus tidak hanya oleh Pemerintah, tetapi juga Parlemen di seluruh dunia dan juga di Kawasan Indo-Pasifik karena perkembangannya yang semakin kompleks. Isu-isu seperti perubahan iklim, krisis kemanusiaan akibat konflik, serta berbagai ancaman keamanan

non-tradisional tentunya sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri negara-negara, termasuk Indonesia.



Berbagai isu tersebut tentunya juga menjadi perhatian BKSAP. Oleh karena itu dalam melaksanakan kerja-kerja diplomasi BKSAP merasa perlu untuk selalu bersinergi dengan para pemangku kepentingan terkait. Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian khusus BKSAP seperti isu krisis kemanusiaan di Myanmar, baik itu soal pengungsi Rohingya maupun kudeta militer di Myanmar. Kemudian mengenai potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan yang sebagaimana dijelaskan oleh Ketua BKSAP, menurut banyak pihak tidak mungkin dielakkan, serta mengenai upaya-upaya pencapaian SDGs yang memerlukan dukungan parlemen. Ketua BKSAP juga menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2021 BKSAP juga memiliki beberapa kegiatan dan sidang internasional baik yang diselenggarakan oleh IPU, maupun organisasi internasional ataupun regional lainnya. Harapannya pada tahun 2022 DPR RI dapat menjadi tuan rumah dari beberapa sidang antara lain Pertemuan Tahunan IPU yang ke-144 dan pertemuan Parlemen dunia yang sejalan dengan G-20, yaitu P-20.

Ketua BKSAP juga menjelaskan bahwa dalam kawasan Indo-Pasifik sendiri kita masih memiliki tanggung jawab moral untuk menguatkan diplomasi pemerintah dalam mendorong segera penyelesaian krisis kemanusiaan yang masih berlangsung hingga

hari ini di Myanmar, mengajak semua pihak untuk menahan diri terkait perkembangan di Laut Tiongkok Selatan, Menyerukan aksi bersama dalam menanggulangi dampak perubahan iklim, menekankan pentingnya Kawasan yang stabil, aman dan damai tanpa senjata nuklir, demi tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs). Pada saat yang bersamaan, tetap menguatkan diplomasi kedaulatan wilayah yang tengah di upayakan oleh pemerintah, dengan membangun dialog dan hubungan persahabatan yang baik dengan parlemen negara-negara Pasifik.



Oleh sebab itu, untuk mendukung pencapaian hal-hal tersebut, BKSAP DPR-RI melalui kedua Panja yang telah dibentuk, terutama Panja Indo-Pasifik, perlu meningkatkan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi dan civil society, dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait kebijakan luar negeri RI serta memperkuat peran DPR RI melalui BKSAP, dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan prioritas kebijakan luar negeri melalui berbagai forum antar parlemen. Selain itu dalam konteks spesifik Indo-Pasifik, melalui pembentukan Panja, diharapkan BKSAP dapat mengeksplorasi dan mendiskusikan lebih jauh mengenai bentuk kerja sama yang dirasa cocok dalam rangka memperkuat dialog antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik.



Selanjutnya dalam paparannya selaku narasumber, I Ketut Putra Erawan, Ph.D yang merupakan Direktur Eksekutif Institute for Peace and Democracy (IPD), menyampaikan bahwa dinamika Geopolitik yang kompleks karena silang kepentingan antara negara-negara besar di Kawasan masih menyisakan peluang bagi Indonesia untuk dapat berperan aktif dengan maksimal melalui Pacific Corridor. Beliau juga menyarankan beberapa langkah strategis yang bisa menjadi pertimbangan BKSAP dalam melaksanakan diplomasi parlemen setahun kedepan, yaitu:

- 1) Memanfaatkan momentum launching green economy di kawasan Indonesia Timur dapat diupayakan sebagai prioritas (dipertajam: dengan segmentasi for Eastern Indonesia dan Pasifik), mengingat indikasi, misalnya, ada negara Pasifik yang akan tenggelam, mungkin bisa dibawa terkait isu ini
- 2) Membangun kerjasama di bidang pendidikan
- 3) Membangun kerja sama dalam pengembangan green economy di kawasan Timur dan Pasifik, public health, dan lingkungan hidup
- 4) Membangun konektivitas infrastruktur dengan membuat link antara pendidikan dan green economy. Realisasi konsep connecting Indo Pasifik, dimulai dengan mengubah perspektif.

Artinya tidak didominasi oleh “perspektif Jawa”, tapi membangun semua tools untuk optimalisasi pembangunan di wilayah Timur, dan Pasifik pada umumnya. Dengan kata lain, pembangunan dan konektivitas diwujudkan mulai dari daerah ‘periphery’.



Sementara itu narasumber lainnya, Dr. I Ngurah Suryawan dari Universitas Warmadewa, menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman melakukan riset di Papua, hingga saat ini masih terdapat perspektif dari Orang Asli Papua (OAP) bahwa pembangunan infrastruktur yang tengah di upayakan oleh pemerintah di Papua tidak mencerminkan sepenuhnya kepentingan masyarakat Papua tetapi lebih merupakan kepentingan Jakarta. Masyarakat Papua secara emosional merasa lebih terkoneksi dengan masyarakat Papua New Guinea karena adanya kesamaan kultur. Temuan-temuan riset ini dijelaskan oleh Dr. I Ngurah Suryawan adalah menggunakan pendekatan budaya dan antropologi. Oleh sebab itu Universitas Warmadewa kedepan akan membentuk ‘Warmadewa Center of International Affairs’ untuk memperkaya penelitian-penelitian terkait dengan Kawasan Pasifik pada umumnya dan Indonesia bagian timur pada khususnya.



Menanggapi paparan dari Universitas Warmadewa, Anggota BKSAP DPR-RI, **Johan Budi** dari Fraksi PDI-P menyampaikan interupsi yang mempertanyakan validitas dari hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Dr. I Ngurah Suryawan. Menurut beliau pernyataan dari narasumber tidak mencerminkan apakah temuan-temuan penelitian tersebut merupakan hasil pengamatan sepihak atau merupakan pengalaman langsung di lapangan. Kemudian narasumber juga tidak menjelaskan mengenai apa definisi dari "lebih terkoneksi" kepada pihak PNG? Pertanyaan kedua, Bagaimana mengusulkan kepada pemerintah baik Indonesia maupun negara-negara Pasifik (mellalui Panja ini) untuk mendorong "didengarnya" aspirasi terkait Indo Pasifik, dan khususnya untuk kepentingan bangsa kita sendiri melalui kerjasama yang dibentuk.



Anggota BKSAP **Irine Yusiana Roba Putri** dari Fraksi PDI-P juga menyampaikan pertanyaan untuk Dr. I Ngurah Suryawan; bahwa dalam waktu dekat Komisi I DPR RI akan bertemu dengan Panglima TNI guna membahas Papua. Khususnya terkait pendekatan TNI terhadap Papua. Apa yang akan Bapak offer jika Bapak berada dalam ruang meeting bersama Panglima utk membahas permasalahan di Papua?



Anggota BKSAP **Fransiskus Lema** dari Fraksi PDI-P juga menyampaikan apresiasi kepada Warmadewa yang akan mendirikan pusat studi Indonesia timur. Pertanyaan: apa signifikansi kawasan Indonesia Timur bagi Indonesia? Mengingat wilayah ekonomi yang sangat lemah. Di sisi lain, wilayah timur Indonesia memiliki banyak potensi dan nilai ekonomis yang tinggi. Tapi, di sisi lain kebijakan pembangunan masih belum sejalan dengan prinsip green economy, agar tidak merusak lingkungan hidup. Di NTT, kawasan konservasi banyak yang sudah rusak.

Selanjutnya, Anggota BKSAP dari Fraksi Partai Demokrat **Didi Irawadi** menyampaikan pandangannya bahwa BKSAP diharapkan dapat berperan lebih giat dalam merespon terkait hegemoni Cina di wilayah Laut Tiongkok Selatan, khususnya tentang bagaimana DPR RI dapat berperan. Terkait COVID-19, kebijakan pemerintah masih belum jelas, sementara pariwisata terus hancur lebur. Mohon

rekomendasi bagaimana seharusnya strategi pemerintah dalam merespon hal ini.



Menanggapi berbagai interupsi dari Anggota, Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon menyampaikan bahwa terkait Panja Indo Pasifik, memang selama ini pembahasan mengenai kawasan ini selama ini tidak pernah membahas spesifik mengenai dinamika Geopolitik yang ada. Barangkali kedepan, ini bisa lebih diangkat lagi. Sementara terkait Papua, memang masalah utama adalah banyak yang merasa “left behind”, bukan hanya perspektif NKRI vs Papua.

Dr. I Ketut Putra Erawan berkesempatan untuk merespon secara spesifik pertanyaan dari Irine Yusiana Roba Putri, bahwa harapannya adalah Panglima TNI bisa menggunakan pendekatan yang lebih humanis mengenai Papua kedepan, tidak lagi mengutamakan pendekatan militer. Hal ini bisa lebih ditonjolkan dengan harapan agar terbangun hubungan emosional yang lebih baik dengan masyarakat Papua. Diskusi diakhiri mengingat keterbatasan waktu terkait acara berikutnya.

2. Acara peluncuran Buku Putih “*Agenda for Green Economy in Indonesia: Policy Initiative, Citizen Assembly and International Cooperation*” bertempat di The Royal Pita Maha, Ubud, Gianyar

Acara peluncuran White Paper Ekonomi Hijau ini mempunyai maksud untuk:

- 1) Melakukan diseminasi hasil kajian tentang agenda ekonomi hijau di Indonesia;
- 2) Menguraikan agenda prioritas dalam pelaksanaan ekonomi hijau;
- 3) Mendapatkan masukan terutama dari para Anggota DPR terkait peta jalan ekonomi hijau di Indonesia;
- 4) Menyerahkan secara resmi Buku Putih Ekonomi Hijau dari Ketua BKSAP ke Pimpinan DPR RI;
- 5) Memberikan masukan substantif terhadap DPR RI sebagai referensi dalam menyusun kebijakan ekonomi hijau;

Sedangkan tujuan dari adanya Buku Putih Ekonomi Hijau ini adalah:

- 1) Memperkuat dan mempertajam kebijakan Pemerintah RI terkait ekonomi hijau;
- 2) Memberikan rekomendasi terkait aspek pengelolaan (governance) ekonomi hijau yang mencakup aspek kelembagaan dan kewenangan;
- 3) Mendorong keterlibatan lebih aktif dari warganegara sehingga mempunyai engagement lebih kuat terhadap agenda ekonomi hijau salahsatunya dengan pembentukkan citizen assembly.

Selanjutnya beberapa sambutan dan pengantar dari narasumber yang dapat dilaporkan adalah sebagai berikut:

Sambutan Ketua BKSAP DPR RI

Dr. Fadli Zon pertama-tama menyampaikan bahwa DPR dewasa ini tidak sekadar menjalankan fungsi representasi tapi kini lebih jauh mengemban mandat mendukung kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah. DPR memainkan peran diplomasi (parliamentary diplomacy) dalam kerangka menjaga dan mewujudkan kepentingan nasional RI.



Lebih lanjut, Ketua BKSAP menyampaikan komitmen DPR RI dalam meng-address berbagai tantangan global tanpa kecuali gagasan ekonomi hijau. DPR RI telah menginisiasi penyelenggaraan World Parliamentary Forum for Sustainable Development (WPFSD) sejak tahun 2017 sampai 2019. Di era pandemi, BKSAP secara virtual berkolaborasi dengan Inter Parliamentary Union (IPU) mengelat The First Global Parliamentary Meeting on Achieving the SDGs pada tanggal 28-30 September 2021. Saat ini, BKSAP DPR RI juga tengah menyiapkan diri sebagai tuan rumah Sidang Umum IPU ke-144 pada 20-24 Maret 2022 dengan mengambil tema “Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change.”

Selanjutnya, Dr Fadli Zon menyoroti kesadaran kolektif dan literasi terkait perubahan iklim dan turunannya seperti gagasan ekonomi hijau masih dinilai rendah. Peluncuran Green Economy White Paper ini merupakan ikhtiar BKSAP untuk mengeksplorasi, mengelaborasi dan menetapkan sudut pandang parlemen terkait

gagasan ekonomi hijau. Terakhir, Dr Fadli Zon menegaskan bahwa ekonomi hijau bukanlah pilihan, tapi kebutuhan untuk menjamin eksistensi manusia dan keberlangsungan Planet Bumi. Ekonomi hijau diyakini dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menjaga kualitas tanah, air, dan udara. Pemanasan global, hilangnya keanekaragaman hayati, penggundulan hutan, penggurunan, penipisan sumber daya secara bertahap dapat diminimalisir dengan menerapkan ekonomi hijau.



Direktur WFD untuk Asia dan Amerika, Mathews Hedges WFD merasa bangga bisa menjadi partner DPR RI dalam upaya memetakan agenda untuk green economy Indonesia. Salahsatu isu yang menjadi pokok diskusi WFD dengan Parlemen Indonesia pertama kali pada September 2020 bersama Ketua BKSAP untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan ekonomi hijau. Pada saat itu juga dibahas mengenai peran parlemen dalam pertumbuhan hijau pasca Covid-19.

Pertemuan-pertemuan di Bali 2021 menghasilkan rencana aksi yang mendorong peningkatan peran diplomasi parlemen tentang perubahan iklim melalui keterlibatan di forum-forum internasional perubahan iklim seperti COP26.



Sambutan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam

Setelah sambutan pengantar disampaikan oleh H. Lodewijk F. Paulus selaku Wakil Ketua DPR RI. Dalam pemaparannya, beliau pertama-tama menyoroti dasar empiris besarnya risiko perubahan iklim dan pemanasan global bagi negara Indonesia yang rawan bencana. Selain itu, seiring dengan dampak perubahan iklim maka ancaman kelangkaan pangan, krisis energi, kekurangan air bersih, dan kerusakan lingkungan semakin nyata.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR juga menegaskan kembali dukungan dan komitmen DPR RI terhadap agenda ekonomi hijau. Sebagai paru-paru dunia yang memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia tentunya memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara yang terdepan dalam penerapan ekonomi hijau.

DPR dan Pemerintah telah berupaya mengejawantahkan gagasan ekonomi hijau ke berbagai instrumen kebijakan. Beberapa aturan yang telah disepakati dan ditetapkan antara lain menyangkut skema peta jalan karbon melalui skema perdagangan karbon (cap and trade) dan skema pajak karbon (cap and tax) untuk menekan emisi salah satunya melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (HPP) yang memuat beberapa poin tentang pajak

karbon. Presiden menandatangani Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai instrumen implementasi kebijakan.



Di tengah paparannya, Wakil Ketua DPR RI juga menyoroti beberapa tantangan pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

Pertama berkaitan dengan aspek kebijakan. Dibutuhkan political will dan inovasi kebijakan yang diterjemahkan ke dalam berbagai instrumen kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Dalam hal ini, juga membutuhkan dukungan berupa transfer teknologi untuk mempercepat proses transformasi.



Kedua, kunci sukses transformasi juga membutuhkan dukungan kelembagaan yang solid. Aspek kelembagaan berkaitan dengan governance atau mekanisme tata kelola termasuk pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antarpihak sehingga terbangun sinergitas dan sinkronisasi.

Ketiga, transformasi ekonomi hijau juga membutuhkan investasi yang sangat besar. Pemerintah telah mengkalkulasi dalam Second Biennial Update Report (BUR) 2018 untuk UNFCCC bahwa kebutuhan pendanaan untuk pengendalian iklim mencapai Rp 3.461 triliun hingga 2030. Sementara itu, kemampuan APBN untuk pendanaan perubahan iklim hanya mencapai rata-rata 4,1%. Karena itu, agenda perubahan iklim membutuhkan kontribusi banyak pihak termasuk pihak swasta dan dunia internasional.

Setelah keempat pembicara memaparkan materinya, selanjutnya adalah sesi diskusi. Namun, karena waktu yang tersisa sangat singkat maka sesi diskusi dibatasi hanya sekitar 10 menit. Karena itu, Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon langsung mengambil forum untuk menyampaikan pernyataan penutup.



Pada sesi diskusi Dr. Fadli Zon menegaskan di akhir acara terkait agenda ekonomi hijau di Indonesia sangat tepat untuk mengikuti koridor yang ada di dalam dokumen White Paper. Agenda menuju ekonomi hijau mencakup tiga koridor utama yaitu policy initiative,

citizen assembly, international cooperation. Di luar semua rekomendasi kebijakan di atas, agenda ekonomi hijau ini membutuhkan keterlibatan masyarakat (citizen engagement) dan juga konsen terhadap penguatan literacy warganegara terkait ekonomi hijau. Di sisi lain, Indonesia juga perlu meningkatkan upaya-upaya implementasi kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam beberapa forum global, seperti COP26, Indonesia selalu mendapatkan pernyaaan terkati deforestasi.

Sedangkan anggota BKSAP Johan Budi memberikan tanggapan bahwa program-program ekonomi hijau dan lingkungan serta energi baru sudah lama digaungkan di Indonesia, namun hingga saat ini tidak ada kesinambungan dan hasilnya minim. Agenda green economy bilangannya bukan lagi 5-10 tahun tapi 30-40 tahun. Karena itu, kita harus menyusun kebijakan yang sangat komprehensif dan hati-hati. Kita sepakat bahwa agenda ekonomi hijau harus dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang yaitu RPJPN. Selain itu, DPR RI juga sepakat bahwa gaung ekonomi hijau harus dinaikan lagi agar semua konsen terhadap agenda itu. Kegiatan ditutup oleh pemandu acara dan diakhiri dengan sesi foto bersama.



III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- 1) Kunjungan Kerja Panitia Kerja Indo-Pasifik berjalan dengan lancar baik yang dilaksanakan di Museum Rudana maupun Acara peluncuran Buku Putih “Agenda for Green Economy in Indonesia: Policy Initiative, Citizen Assembly and International Cooperation” bertempat di The Royal Pita Maha, Ubud, Gianyar, Bali.
- 2) Melalui Kunjungan Kerja ini, BKSAP mendapatkan berbagai masukan yang cukup signifikan untuk menguatkan implementasi diplomasi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, melalui diplomasi parlemen, serta telah berhasil untuk Melakukan diseminasi hasil kajian tentang agenda ekonomi hijau di Indonesia dan Memberikan masukan substantif terhadap DPR RI sebagai referensi dalam menyusun kebijakan ekonomi hijau
- 3) Diskusi yang berjalan antara Pimpinan dan anggota BKSAP dengan perwakilan *Civil Society* dan Akademisi menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Pimpinan BKSAP dalam melaksanakan diplomasi parlemen terkait kawasan Indo-Pasifik kedepan, khususnya untuk tahun 2022
- 4) Beberapa rekomendasi hasil dialog yang dapat dipertimbangkan oleh Pimpinan BKSAP dalam melaksanakan Diplomasi Parlemen terkait kawasan Indo-Pasifik kedepan antara lain yaitu:
 - a) Memanfaatkan momentum launching *green economy* di kawasan Indonesia Timur dapat diupayakan sebagai prioritas (dipertajam: dengan segmentasi for *Eastern Indonesia* dan Pasifik), mengingat indikasi, misalnya, ada negara Pasifik yang akan tenggelam, mungkin bisa dibawa terkait isu ini;
 - b) Membangun kerjasama di bidang pendidikan 3) Membangun kerja sama dalam pengembangan *green economy* di kawasan Timur dan Pasifik, *public health*, dan lingkungan hidup;
 - c) Membangun konektivitas infrastruktur dengan membuat link antara pendidikan dan *green economy*;
 - d) Dalam rangka merealisasikan konsep *connecting* Indo Pasifik, dapat dimulai dengan mengubah perspektif, artinya tidak

didominasi oleh “perspektif Jawa”, tetapi membangun semua *tools* untuk optimalisasi pembangunan di wilayah Timur pada khususnya, dan Pasifik pada umumnya. Dengan kata lain, pembangunan dan konektivitas diwujudkan mulai dari daerah ‘periphery’ atau daerah yang paling pinggir di wilayah Indonesia.

- 5) Agenda ekonomi hijau juga membutuhkan pelibatan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Terdapat banyak instrumen dan modal sosial di Indonesia yang bisa dikembangkan untuk menjadikan ekonomi hijau menjadi socially-grounded. Keberadaan citizen assembly akan menjadi ruang bagi pelaksanaan demokrasi deliberatif warga negara terhadap berbagai agenda ekonomi hijau.
- 6) Peran parlemen yaitu DPR RI sangat vital dalam agenda ekonomi hijau. DPR RI bisa berperan sebagai boundary-spanner antar parlemen lintas negara dan antara pemerintah dan masyarakat. Tentunya selain melaksanakan fungsi-fungsi tradisional seperti legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Selanjutnya, DPR RI juga harus menjadi yang terdepan dalam upaya penguatan literasi perubahan iklim dan ekonomi hijau di tingkat akar rumput.

B. SARAN

- 1) BKSAP dapat mengkomunikasikan substansi hasil kegiatan kepada Alat Kelengkapan DPR RI yang relevan untuk ditindaklanjuti. Beberapa substansi yang penting dan menyangkut kerjasama regional maupun multilateral dapat ditelaah lebih mendalam untuk menjadi poin-poin usulan rancangan resolusi dan *outcomes document* di sidang-sidang parlemen yang dihadiri DPR RI.
- 2) Poin-poin substantif yang dihasilkan kegiatan ini dapat ditindaklanjuti sebagai arah penguatan kerjasama antara BKSAP dengan multipihak di masa mendatang.
- 3) BKSAP dapat melibatkan Akademisi dan Civil Society di Indonesia untuk memberikan masukan dalam sidang-sidang regional maupun internasional yang dihadiri BKSAP apabila mengangkat tema-tema spesifik sesuai dengan tema yang tengah mengemuka di Indo-Pasifik ataupun yang terkait dengan lingkungan hidup, khususnya Green Economy.

IV. PENUTUP

A. UCAPAN TERIMAKASIH

Delegasi DPR RI menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu kelancaran kegiatan kunjungan kerja Panitia Kerja BKSAP di Gianyar, Bali. Khususnya kepada Museum Rudana, Hotel The Royal Pita Maha, Universitas Warmadewa dan Westminster Foundation for Democracy yang turut menyukseskan kegiatan dimaksud.

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

- *Paparan narasumber*
- *Materi Delegasi*
- *Term of Reference*
- *Dokumentasi*
- *Liputan media elektronik*

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kunjungan Kerja Indo-Pasifik pada tanggal 11 – 13 Januari 2022 ke Ubud, Gianyar, Bali. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2021

a.n.Delegasi
Ketua Delegasi,



Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc
A-86



DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI dan LIPUTAN ELEKTRONIK PANJA BALI 2022



Delegasi Panitia Kerja untuk Kerja Sama Indo-Pasifik berpose di depan Museum Rudana, Ubud, Gianyar





Putu Supadma Rudana menyambut Delegasi Panitia Kerja untuk Kerja Sama Indo-Pasifik di Museum Rudana Ubud, Gianyar





Pelaksanaan Dialog tentang isu-isu terkini di Kawasan Indo-Pasifik dengan Civitas Akademika dan Civil Society di Museum Rudana, Ubud, Gianyar





Pelaksanaan Kegiatan Peluncuran Buku Putih di The Royal Pita Maha, Ubud, Gianyar



Diskusi Panja Indo Pasifik di Museum Rudana, BKSAP DPR RI Tekankan Pentingnya Percepatan Pembangunan di Indonesia Timur

12 Januari 2022 SOSIAL & BUDAYA Gianyar

Facebook YouTube LINE WhatsApp Email More



Foto: Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (PSR) memandu acara diskusi BKSAP DPR RI "Proyeksi kerjasama Indonesia Pasifik 2022 Perspektif Parlemen" di Museum Rudana, Rabu (12/1/2022).

Baliberkarya.com-Ubud. Panja Indo Pasifik dan Panja SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar diskusi di Museum Rudana di Jalan Cokorda Rai Puduk No. 44, Desa Pelatnan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Rabu (12/1/2022).

Diskusi BKSAP DPR RI di museum yang tersohor hingga ke mancanegara ini membahas terkait dengan tugas dari Panja Indo Pasifik bertajuk "Proyeksi Kerjasama Indonesia Pasifik 2022 Perspektif Parlemen" yang juga menghadirkan dua narasumber akademisi yakni Dr. Putra Erawan dan Dr. Ngarah Suryawan dari Universitas Warmadewa yang dipandu oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (PSR) yang juga Pimpinan Museum Rudana & Rudana Fine Art Gallery Rudana.

Dalam diskusi ini lebih banyak ditekankan pentingnya percepatan pembangunan di Indonesia Timur yang merupakan representasi kawasan Indonesia di kawasan Pasifik. Dalam konteks itu diperlukan lebih banyak kajian pembangunan Indonesia Timur dan

- Satukan IKB Flobamora di Indonesia dan Dunia, Flobamora Indonesia Sepakat Deklarasi di Bali
SOSIAL & BUDAYA - 30/01/2022
- Getar Aksi Kebersihan dan Tanam Mangrove Wawali Arya Wibawa dan KPS Hijaunya Muntig Siokan
PERISTIWA - 30/01/2022
- Sambut Hut Kota Denpasar ke 234 Pemkot Denpasar Gandeng Yayasan Beji Bhowana Bali Bersihkan Situs Budaya
PERISTIWA - 30/01/2022
- Tangani Kenalkan Kasus di Jembrana, Bupati Tamba Intruksikan Tingkatkan Prokes dan Tambah Kapasitas Isolasi
KESEHATAN - 30/01/2022
- Bupati Tamba - Jembrana Potensial Destinasi Wisata Otonomi
OLAHRAGA - 30/01/2022
- Mih Dewa Ratu, Aksi Illegal Logging Kembali Terjadi di Desa Sankuning Tawed
HUKUM & KRIMINAL - 30/01/2022



Terpopuler

Heboh! Perempuan Cantik



Berita Media Online terkait kegiatan Panitia Kerja untuk Kerja Sama Indo-Pasifik di Gianyar, Bali

PenaBali TEROBOSAN ITB STIKOM BALI UNTUK NEGERI DI MASA PANDEMI PRODIKSI KURASI SAMA, NEGARA SINGAPORE siap.stikom-bali.ac.id siapmaganang.stikom-bali.ac.id

HOME BALI BERTITA BERITA PERISTIWA HUKUM TAJUK EKOPOLSOSBUD REDAKSI

Home / Berita / Di Museum Rudana, BKSAP DPR RI Adakan Diskusi Panja Indo-Pasifik

Berita Gianyar

Di Museum Rudana, BKSAP DPR RI Adakan Diskusi Panja Indo-Pasifik

By Pena Bali | 13 Jan 2022

BKSAP DPR RI menggelar diskusi "Proyeksi Kerjasama Indonesia Pasifik 2022 Perspektif Parlemen" di Museum Rudana. (foto: Ist.)

Gianyar (PenaBali.com) - Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Diskusi Panitia Kerja (Panja) Indo-Pasifik BKSAP DPR RI di Museum Rudana, Rabu (12/01/2022).

"Kawasan Indo-Pasifik adalah kawasan yang sangat strategis dan menjadi perhatian dunia," kata Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, dalam acara diskusi yang bertajuk "Proyeksi Kerjasama Indonesia Pasifik 2022 Perspektif Parlemen".

Diskusi di Museum Rudana ini serangkaian kunjungan kerja ke Bali dalam rangka menyelesaikan tugas dari Panja Indo-Pasifik dan Panja SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Diskusi "Proyeksi Kerjasama Indonesia-Pasifik 2022 Perspektif Parlemen" menghadirkan dua narasumber akademisi yakni Dr. Putra Erawan dan Dr. Ngarah Suryawan dari Universitas Warmadewa dan dipandu Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (PSR) yang juga Pimpinan Museum Rudana & Rudana Fine Art Gallery Rudana.

Fadli Zon mengungkapkan, Indonesia selama ini lebih banyak menampilkan wajah Asia ketimbang Pasifik padahal Indonesia ini punya dua wajah yakni wajah Asia dan wajah Pasifik. Wajah Pasifik direpresentasikan Indonesia Timur dengan 5 provinsi dan penduduk 13 juta orang yang merupakan entitas Pasifik terbesar.

Berita Lainnya

Denpasar **Pendataan**

Pena Bali | 4 hours ago | Unwar lahirkan Curu Besar ke-14, Prof. Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, SH, MH, M.Hum.







**Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Gedung Nusantara III, Lantai 6, Komplek MPR/ DPR/ DPD RI
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Telp. : 021-5715 294/210

Faks. : 021-5752132

Email : biro_ksap@dpr.go.id



@bksapdpr



@bksapdpri



BKSAP DPRRI



BKSAP DPRRI



<http://ksap.dpr.go.id>